

ABSTRAK

Pemanfaatan adalah sebagai salah satu proses atau cara yang dilakukan oleh para instansi atau penegak hukum lainnya dalam halnya memanfaatkan benda sitaan dan barang rampasan yang menjadi benda hasil sitaannya agar dapat dipergunakan dengan baik. Namun dalam hal perawatan terhadap benda sitaan dan barang rampasan tidak memenuhi standar, ada pula aparat penegak hukum yang memakai bahkan menjual benda-benda hasil sitaan tersebut. Dalam hal ini terdapat kurangnya pengoptimalisasian terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara, sehingga berdampak pada pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mengetahui manfaat benda sitaan negara dan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Metode yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk menguraikan secara analitis terhadap permasalahan yang dihadapi, dan hasil wawancara dari pihak-pihak yang bersangkutan maupun peraturan-peraturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, karena terdapat faktor yang mempengaruhi didalamnya. Faktor yang paling utama pada proses pengelolaan tersebut adalah faktor sarana atau fasilitas. Selain itu, pemanfaatan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dilakukan dengan cara penyimpanan dan pelelangan. Di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tidak mendapatkan anggaran dari negara, sehingga dalam hal ini sangat menghambat proses pengelolaan.

Kata kunci : Pemanfaatan, Benda Sitaan, Kejaksaan.

ABSTRACT

Utilization is as one of the process or way done by the institution or other law enforcement in the case of expropriated and confiscated objects that become confiscated objects to be used properly. However, in the case of confiscated items and booty does not meet the standards, there is also law enforcement office who use even sell the confiscated objects. In this case there is a lack of optimization of confiscated and confiscated goods of the state, this affecting the recovery of assets. This study aims to determine whether the management of state confiscated objects and the spoils of the country resulting from corruption have been in accordance with the established procedures and to know the benefits of confiscated objects of state and spoils of the state of corruption in the State Attorney Office of Bekasi City. The method used is sociological juridical with analytical descriptive specification to analytically describe the problems encountered, and the results of interviews from the parties concerned as well as existing regulations. The results showed that the management of confiscated objects of state and state spoils in the State Attorney Bekasi City not in accordance with the established procedures, because there are factors that affect therein. The most important factor in the management process is the factor of facilities or facilities. In addition, the utilization of confiscated objects or state and spoils of state in the State Prosecutor of Bekasi City is done by way of storage and auction. At the Bekasi District Attorney Office did not get the budget from state, so in this case greatly hinder the management process.

Keywords : Utilization, Confiscated Objects, Procuratorate.